

**PELAKSANAAN PROGRAM PEMBERANTASAN BUTA AKSARA DI  
KECAMATAN BINTAN PESISIR KABUPATEN BINTAN  
(Studi Terhadap Suku Laut Di Desa Air Glubi)**

Rusni <sup>1</sup>, Nur Aslamaturrahmah Dwi Putri <sup>2</sup>, Nazaki <sup>3</sup>

Rusnigayo07@gmail.com

Program Studi Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik  
Universitas Maritim Raja Ali Haji

**ABSTRAK**

Komunitas adat terpencil cenderung tertutup dengan dunia luar, sehingga berdampak pada tingkat pendidikan mereka yang sangat rendah, maka dari itu perlu adanya program pendidikan keaksaraan. Mereka terikat kuat kepada adat istiadat, sehingga kerap mengasingkan diri dari situasi luaran semata-mata hanya untuk mempertahankan kebiasaan peninggalan leluhurnya. Karena mereka cenderung tertutup pada dunia luar, sehingga berdampak pada tingkat pendidikan mereka yang sangat rendah. tingkat buta aksara masih ada khususnya di daerah-daerah yang mayoritas adalah suku laut seperti Numbing dan Desa Glubi. Tujuan penelitian ini Untuk mengetahui Pelaksanaan Program Pemberantasan Buta Aksara Di Kecamatan Bintan Pesisir Kabupaten Bintan (Studi Terhadap Suku Laut Di Desa Air Glubi) dan untuk mengetahui faktor yang menghambat dan mendorong serta dampak yang ditimbulkan dari Pelaksanaan Program Pemberantasan Buta Aksara Di Kecamatan Bintan Pesisir Kabupaten Bintan (Studi Terhadap Suku Laut Di Desa Air Glubi). Pada penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian Deskriptif kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian maka dapat diambil kesimpulan bahwa Pelaksanaan Program Pemberantasan Buta Aksara Di Kecamatan Bintan Pesisir Kabupaten Bintan (Studi Terhadap Suku Laut Di Desa Air Glubi) sudah berjalan namun banyak yang perlu diperhatikan, kondisi lingkungan suku laut memang tidak terlalu mendukung adanya program buta aksara ini, mereka yang kebanyakan tinggal di laut sulit diajak berkomunikasi untuk menjelaskan tentang program buta aksara ini, hasilnya hanya beberapa keluarga saja yang mau ikut dalam program tersebut, Desa Glubi lebih identik menjadi kawasan yang terpinggirkan

Kata Kunci : Pelaksaaan, Program Keaksaraan, Suku Laut

---

<sup>1</sup> Mahasiswa Ilmu Pemerintahan Negara Universitas Maritim Raja Haji Tanjungpinang

<sup>2</sup> Dosen Ilmu Pemerintahan Universitas Maritim Raja Haji Tanjungpinang

<sup>3</sup> Dosen Ilmu Pemerintahan Universitas Maritim Raja Haji Tanjungpinang

## PENDAHULUAN

Pendidikan merupakan hak dasar manusia. Pendidikan menjadi faktor penting karena pendidikan mampu meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan sebagai indikator pengukuran dalam pencapaian pembangunan manusia sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai. Pendidikan Non-Formal dan Informal berupaya meningkatkan pengetahuan, keterampilan, sikap dan nilai yang dirancang dan dilaksanakan secara langsung dan terstruktur dengan sasaran yang luwes, fungsional, dan pengembangan kecakapan hidup untuk sepanjang hayat.

Salah satu pendidikan non-formal dan informal yaitu pendidikan keaksaraan. Aksara merupakan sistem penulisan suatu bahasa dengan menggunakan tanda-tanda, bukan hanya sebagai huruf atau rangkaian abjad. keaksara membentuk wacana yang dapat dikenali, dipahami, diterapkan dan diwariskan dari satu generasi ke generasi berikutnya, untuk mewujudkan aksara yang membangun peradaban diperlukan kemampuan ragam keaksaraan yang memberdayakan. (Syamy Anggoro Kasih, 2009)

Menurut Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 tahun 2003 pasal 1 menyebutkan bahwa tujuan pendidikan nasional adalah mengembangkan potensi peserta didik untuk mempunyai kecerdasan, kepribadian dan akhlak yang mulia. Tujuan undang-undang yakni agar generasi muda memiliki kecerdasan yang mampu mewujudkan cita-cita dari negara kesatuan Republik Indonesia. Kecerdasan ini tentunya timbul karena adanya beberapa faktor, yaitu keturunan, gizi dan lingkungan.

Menurut Direktorat Pendidikan Luar Sekolah dan Pemuda (PLSP) dalam Kusnadi, dkk (2003:50) Program pemberantasan buta huruf atau pendidikan

keaksaraan adalah pendidikan yang diselenggarakan bagi masyarakat penyandang buta aksara untuk menumbuhkan dan mengembangkan kemampuan keaksaraan (membaca, menulis dan berhitung) serta keterampilan fungsional yang dibutuhkan terkait dengan kemampuan keaksaraan itu, sehingga dengan kemampuan keaksaraan itu mereka dapat menguasai pengetahuan dasar (basic education) yang dibutuhkan dalam habitat dan komunitas hidupnya

Program pemberantasan buta aksara di Indonesia sesungguhnya telah dimulai sebelum Indonesia merdeka pada tahun 1945 sampai sekarang dengan berbagai macam program yang didukung oleh badan internasional seperti *United Nations of Educational, Scientific, and Cultural Organization* (UNESCO). Pendidikan yang diharapkan mampu membawa kemajuan dan kesejahteraan hidup ternyata belum mampu dinikmati, khususnya bagi masyarakat yang berada di daerah terpencil. Buta aksara merupakan ketidakmampuan seseorang dalam membaca, menulis, dan berhitung. Padahal ketiga kemampuan tersebut sangat penting dalam menunjang aspek kehidupan, sehingga buta aksara dapat mengakibatkan kemiskinan, kebodohan, keterbelakangan, dan ketidakberdayaan masyarakat. (Vega Jessica, dkk : 2017 : 136)

Gerakan pendidikan keaksaraan didukung oleh Permendiknas Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2006 tentang Pedoman Gerakan Nasional Percepatan Penuntasan Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun dan Pemberantasan Buta Aksara. Strategi dan pelaksanaan Gerakan Nasional Percepatan Penuntasan Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun (GNP-PWB) : Perluasan dan pemerataan pendidikan. Peningkatan mutu, relevansi, dan daya saing pendidikan. Tata kelola, akuntabilitas, dan pencitraan publik.

Berdasarkan petunjuk teknis bantuan operasional penyelenggaraan pendidikan keaksaraan dasar tahun 2017 dijelaskan bahwa selain penduduk buta aksara juga di jumpai pada komunitas adat terpencil/khusus, konsep dasar komunitas adat terpencil dimaknai dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang kesejahteraan sosial sebagai keterpencilan yaitu komunitas sosial budaya yang bersifat local dan terpencar serta kurang atau belum terlibat dalam jaringan pelayanan baik sosial, ekonomi, maupun politik.

Komunitas adat terpencil cenderung tertutup dengan dunia luar, sehingga berdampak pada tingkat pendidikan mereka yang sangat rendah, maka dari itu perlu adanya program pendidikan keaksaraan. Mereka terikat kuat kepada adat istiadat, sehingga kerap mengasingkan diri dari situasi luaran semata-mata hanya untuk mempertahankan kebiasaan peninggalan leluhurnya. Karena mereka cenderung tertutup pada dunia luar, sehingga berdampak pada tingkat pendidikan mereka yang sangat rendah. Oleh karena itu, untuk menuntaskan mereka dari buta aksara, tampaknya perlu disusun program pendidikan keaksaraan yang memerhatikan aspek-aspek pemenuhan kebutuhan dasar, realitas sosial dan latar budaya mereka, serta keterpaduan proses pengentasan buta aksara antara peserta didik, masyarakat dan pemangku kepentingan pendidikan keaksaraan. Keterpaduan penyelenggaraan pendidikan keaksaraan bukan saja dapat mengatasi masalah penyelenggaraan dan pengembangan keaksaraan, tetapi juga menumbuhkan kesadaran akan arti-pentingnya keaksaraan untuk menghadapi tantangan kehidupan yang mengglobal, serta dapat merangsang inspirasi bagi terjadinya transformasi sosial.

Pendidikan keaksaraan dasar Komunitas Adat Terpencil/Khusus adalah layanan pendidikan pada warga masyarakat buta aksara latin agar memiliki kemampuan membaca, menulis, dan berhitung, Berbahasa Indonesia, dan menganalisa sehingga memberikan peluang untuk aktualisasi potensi diri pada komunitas adat terpencil/khusus.

Dasar Hukum pendidikan keaksaraan adalah Peraturan Menteri Pendidikan Nomor 86 Tahun 2014 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan Keaksaraan Dasar. Penyusunan pedoman penyelenggaraan pendidikan keaksaraan dasar ini bertujuan untuk:

1. menjamin penyelenggaraan pendidikan keaksaraan dasar;
2. mendorong pengembangan budaya mutu pendidikan keaksaraan dasar;
3. mendorong percepatan peningkatan dan pemerataan mutu pendidikan keaksaraan dasar;
4. melindungi warga negara dari praktik pendidikan keaksaraan dasar yang tidak terstandar; dan
5. menuntaskan target pemberantasan buta aksara.

Salah satu Komunitas Adat Terpencil adalah suku laut. Kabupaten Bintan memiliki wilayah-wilayah pesisir seperti salah satunya adalah Kecamatan Bintan Pesisir, di daerah ini masih banyak di diami oleh suku sampan atau biasa disebut suku laut. Orang Suku Laut adalah kelompok etnis dalam jumlah kecil di tengah mayoritas masyarakat Melayu. Tahun 2017, Orang Laut di Bintan persebarannya tak jauh berubah. (Kemdikbud : 2019)

Ada dua wilayah di kecamatan Bintan Pesisir yang masih di diami oleh masyarakat suku laut yaitu Air Glubi dan Numbing. Rata-rata masyarakat suku laut tersebut memiliki ketertinggalan karena kehidupan sehari-hari mereka dilakukan diatas sampan dan mereka tidak mengenal daratan termasuk masalah pendidikan. Kehidupan pendidikan yang ada di darat maupun diperairan sebenarnya sama hanya dibutuhkan suatu tempat yang bisa dijadikan tempat pembelajaran, dimana kita bisa menuntut ilmu. Suku laut juga merupakan suku yang terisolir karna cara bertempat tinggal yang berbeda. Dengan cara hidup yang selalu berpindah-pindah sangat sulit untuk mengembangkan pendidikan dalam daerah tersebut. Di suku perairan masih banyak yang belum mengerti pentingnya pendidikan untuk kehidupan yang semakin maju.

Pola pikir orang suku laut cukup berbeda dengan masyarakat lainnya. Anak-anak suku laut banyak yang tidak memikirkan sekolah atau pendidikannya. Karena pagi-pagi mereka sudah mengikuti keluarga mereka kemana-mana. Ada ke pulau dan melaut faktor itu lah yang sangat menghambat proses pendidikan di suku laut tidak berjalan sempurna.

Tingkat buta aksara masih ada khususnya di daerah-daerah yang mayoritas adalah suku laut seperti Numbing dan Desa Glubi. Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) sebagai satuan pendidikan yang ada di Kecamatan Bintan Pesisir akan disebut aktif apabila dapat melaksanakan program karena adanya bantuan dana dari pemerintah khususnya ada di Kecamatan Bintan Pesisir sehingga pelaksanaan penyelenggaraan pendidikan keaksaraan dasar di Kecamatan Bintan Pesisir tidak dapat optimal karena target PKBM, jumlah

pengelola, jumlah peserta didik, jumlah tenaga pendidik hanya menyesuaikan jumlah anggaran yang ada.

Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) merupakan suatu wadah dimana seluruh kegiatan belajar masyarakat dalam rangka peningkatan pengetahuan, keterampilan/keahlian, hobi, atau bakatnya yang dikelola dan diselenggarakan sendiri oleh masyarakat. PKBM adalah sebagai wahana untuk mempersiapkan warga masyarakat agar bisa lebih mandiri dalam memenuhi kebutuhan hidupnya, termasuk dalam hal meningkatkan pendapatannya. Sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta masalah-masalah pendidikan masyarakat serta kebutuhan akan pendidikan masyarakat, definisi PKBM terus disempurnakan terutama dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, kebutuhan lembaga, sasaran, kondisi daerah serta model pengelolaan. (Sihombing dan Gutama, 2000)

Dari definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa PKBM adalah sebuah lembaga pendidikan yang dikembangkan dan dikelola oleh masyarakat serta diselenggarakan di luar sistem pendidikan formal baik di perkotaan maupun di pedesaan dengan tujuan untuk memberikan kesempatan belajar kepada seluruh lapisan masyarakat agar mereka mampu membangun dirinya secara mandiri sehingga dapat meningkatkan kualitas hidupnya. Untuk itulah PKBM berperan sebagai tempat pembelajaran masyarakat terhadap berbagai pengetahuan atau keterampilan dengan memanfaatkan sarana, prasarana dan potensi yang ada di sekitar lingkungannya (desa, kota), agar masyarakat memiliki keterampilan yang dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan taraf hidup.

Di Kecamatan Bintang Pesisir yang menjalankan program keaksaraan adalah BKM (Badan Keswadayaan Masyarakat). Peran BKM di masyarakat adalah sebagai roda penggerak masyarakat yang akan mengembangkan modal sosial yaitu kemampuan masyarakat untuk bekerjasama demi mencapai tujuan bersama di dalam berbagai kelompok dan organisasi. PKBM di Bintang berjumlah 12 PKB, namun saat ini tercatat hanya 9 PKBM yang masih aktif, yang diuraikan sebagai berikut :

1. PKBM Persada Bahari
2. PKBM Maju Lestari
3. PKBM Harapan Insan
4. PKBM Bintang Payung
5. PKBM Bestari
6. PKBM Nilam Permata Bintang
7. PKBM Karang Betuah
8. PKBM Insan Cendikia, dan
9. PKBM Bintang Sari

Untuk mengetahui tentang permasalahan pelaksanaan program buta aksara di Kecamatan Bintang Pesisir, maka penulis bermaksud meneliti lebih lanjut dalam bentuk penulisan skripsi dengan memilih judul penelitian: : “Pelaksanaan Program Pemberantasan Buta Aksara Di Kecamatan Bintang Pesisir Kabupaten Bintang (Studi Terhadap Suku Laut Di Desa Air Glubi)”



## **BAHAN DAN METODE**

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan oleh peneliti yaitu, observasi, wawancara mendalam dan dokumentasi. Alat penelitian yang digunakan adalah pedoman wawancara, yang menjadi fokus dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui Pelaksanaan Program Pemberantasan Buta Aksara Di Kecamatan Bintan Pesisir Kabupaten Bintan (Studi Terhadap Suku Laut Di Desa Air Glubi)

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Kondisi lingkungan suku laut memang tidak terlalu mendukung adanya program buta aksara ini, mereka yang kebanyakan tinggal di laut sulit diajak berkomunikasi untuk menjelaskan tentang program buta aksara ini, hasilnya hanya beberapa keluarga saja yang mau ikut dalam program tersebut. Kondisi geografis Indonesia sebagai negara yang terdiri dari pulau-pulau memiliki pengaruh pada laju perkembangan masyarakat dalam segala aspek seperti perkembangan pada aspek ekonomi yang saat ini masih menjalani proses pemerataan yang tentunya pemerintah memiliki peran penting dalam hal tersebut sehingga munculnya otonomi daerah, selain itu aspek sosial kemasyarakatan dan tak luput juga adalah aspek pendidikan yang tentunya akan menentukan masa depan bangsa dan negara.

Berkaitan dengan kondisi geografis negara Indonesia yang dipisahkan oleh laut, maka hal tersebut merupakan salah satu kendala bagi pemerintah untuk dapat melaksanakan program-program yang dirancang khususnya pada bidang pemerataan pendidikan di Indonesia. Masyarakat yang memiliki bermacam-

macam kultur serta perbedaan status sosial ekonomi juga akan mempengaruhi laju aspek pendidikan tersebut, suku laut banyak yang belum menerima program ini, sebagian dari mereka merasa bahwa program ini tidak menguntungkan, kurangnya komunikasi antara pemerintah, PKBM dan masyarakat suku laut menjadi faktor utama kegagalan program ini. Suku laut di Desa Glubi masih banyak yang menutup diri terhadap perubahan salah satunya dalam bidang pendidikan ini. Pendidikan yang diharapkan mampu membawa kemajuan dan kesejahteraan hidup ternyata belum mampu dinikmati, khususnya bagi masyarakat yang berada di daerah terpencil

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pelaksanaan Gerakan Nasional Percepatan Penuntasan Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun Dan Pemberantasan Buta Aksara dijelaskan bahwa program ini adalah program pusat langsung yaitu kementerian, bersama gubernur dan walikota/Bupati kemudian langsung bekerjasama dengan pihak kecamatan dan desa yang di tuju.

Kerja sama yang baik antara berbagai pihak dalam mensukseskan program buta akasara sangatlah penting untuk dilakukan karena dengan adanya kerja sama maka tujuan dari program ini akan tercapai. Untuk menanggulangi kemiskinan, pemerintah Indonesia telah meluncurkan berbagai program termasuk pengentasan buta aksara. Dari hasil wawancara dengan informan maka dapat dianalisa bahwa kerjasama belum terjalin dengan baik. Keberhasilan pelaksanaan program juga dipengaruhi oleh keterampilan pelaksana. Keterampilan pelaksana mempengaruhi keberhasilan pelaksanaan program. Dalam pelaksanaan program buta akasara

keterampilan pelaksana dibutuhkan saat sosialisasi program, verifikasi data, pencairan dana, dan pembuatan laporan pelaksanaan.

Pendidikan merupakan hal yang utama di era globalisasi sekarang ini. Pendidikan dapat diperoleh baik melalui jalur formal ataupun non formal. Pendidikan tidak dapat terlepas dari keberadaan ilmu pengetahuan, keterampilan, dan kreativitas yang dapat menentukan kecekatan seseorang dalam berpikir tentang diri dan lingkungannya (Heryanto 2011). Buta aksara merupakan ketidakmampuan seseorang dalam membaca, menulis, dan berhitung. Kemampuan tersebut sangat penting dalam menunjang aspek kehidupan, sehingga buta aksara dapat mengakibatkan kemiskinan, kebodohan, keterbelakangan, dan ketidakberdayaan masyarakat.

Kemudian sudah ada tenaga pendamping yang ditempatkan di desa air glubi ini. Tugas utama para pendamping program ini adalah untuk mendampingi suku laut dalam memanfaatkan aksesibilitas terhadap pelayanan pendidikan khususnya dalam pengentasan buta aksara. Dalam konteks ini, peranan seorang pekerja sosial seringkali diwujudkan dalam kapasitasnya sebagai pendamping, bukan sebagai penyembuh atau pemecah masalah secara langsung. Pemberdayaan masyarakat dapat didefinisikan sebagai tindakan sosial dimana penduduk sebuah komunitas mengorganisasikan diri dalam membuat perencanaan dan tindakan kolektif untuk memecahkan masalah sosial atau memenuhi kebutuhan sosial sesuai dengan kemampuan dan sumberdaya yang dimilikinya, sumber daya manusia dalam program pengentasan buta aksara ini khususnya bagi masyarakat suku laut di Desa Air Glubi. Peran mereka adalah peran seseorang yang menjadikan dirinya sebagai mediator, fasilitator, pendidik, pemungkin, sekaligus

sebagai perwakilan bagi masyarakat yang mengupayakan agar masyarakat hidup secara mandiri.

Berdasarkan Petunjuk pelaksana Program Buta Aksara Sarana dan prasarana yang harus/wajib dimiliki sekurang-kurangnya memenuhi persyaratan teknis baik dari segi jumlah maupun kualitasnya, diantaranya: a. Sarana dan prasarana pembelajaran: 1) Tempat pembelajaran 2) Alat tulis 3) Modul atau bahan ajar lain b. Sarana administrasi pembelajaran: 1) Buku induk peserta didik 2) Buku laporan perkembangan kemajuan dan hasil belajar peserta didik c. Sarana administrasi keuangan: Buku kas umum d. Sarana administrasi umum: Buku tamu. Dan jika dilihat PKBM yang ada di Desa Air Glubi, beberapa syarat khusus, sudah terpenuhi yaitu tempat belajar, alat tulis, modul, dan sarana administrasi.

Pendidikan keaksaraan dasar Komunitas Adat Terpencil/Khusus adalah layanan pendidikan pada warga masyarakat buta aksara latin agar memiliki kemampuan membaca, menulis, dan berhitung, Berbahasa Indonesia, dan menganalisa sehingga memberikan peluang untuk aktualisasi potensi diri pada komunitas adat terpencil/khusus.

Kemampuan agen pelaksana harus ditingkatkan karena perlu adanya dukungan kemudian pemahaman tentang program ini. Karena program ini banyak membutuhkan pihak pelaksana yang memahami. Peserta kegiatan Peserta dalam kegiatan ini sebanyak 55 orang dari rentang umur 17–59 tahun dan masih tergolong usia produktif. Latar belakang pendidikan peserta adalah ada yang belum pernah sama sekali mengikuti pendidikan dan yang putus sekolah. Target kegiatan Selama kegiatan, diharapkan minimal 60% peserta sudah melek huruf dengan asumsi bahwa jangka waktu yang tersedia terbatas. Namun demikian,

program ini akan dilaksanakan secara berkelanjutan agar buta aksara benar-benar terberantas sempurna dan masyarakat dapat melek huruf secara permanen. Kestinambungan program diwujudkan dalam perjanjian kerja sama dengan PKBM Harapan Bersama untuk terus melakukan kegiatan pemberantasan buta aksara.

Kemudian pelaksana juga harus benar-benar memahami karena metode pembelajaran yang diterapkan dalam kegiatan ini adalah metode yang menitikberatkan pada keaktifan peserta, namun pembelajaran dilakukan dengan tim pelaksana sebagai pembawa materi. Setelah materi, peserta kemudian diberi kegiatan untuk aktif berlatih dengan pendampingan dari tim sebagai fasilitator. Tindakan yang dilakukan dalam program ini dimulai dengan melakukan pre test untuk mengetahui kemampuan awal peserta, yaitu kemampuan membaca, menulis, dan berhitung. Selanjutnya dilakukan pembelajaran huruf dan angka yang mengacu pada modul yang disusun oleh tim pelaksana PKM dalam tiga tahapan dan setiap tahapan pembelajaran tersebut selalu diikuti dengan evaluasi untuk mengetahui perkembangan kemajuan aksara peserta. Kegiatan terakhir adalah melakukan post test, yaitu tes terakhir yang dilakukan untuk mengetahui tingkat perkembangan keaksaraan peserta setelah semua proses pembelajaran.

Berdasarkan hasil penelitian maka diketahui bahwa di Desa Air Glubi sendiri kelompok belajar hanya ada 1 kelompok, dan kegiatan belajar baru dilakukan setelah orang terkumpul banyak, jika dari waktu yang ditentukan tidak banyak yang hadir maka mereka tidak dapat menjalankan kegiatan tersebut.

Kegiatan ini dimulai dengan mengajukan izin kepada Kepala Desa Glubi sebagai wilayah yang ditunjuk menjadi lokasi kegiatan. Waktu pelaksanaan program selama tiga bulan. Selanjutnya menjalin kerja sama dengan mitra, yaitu

Pusat Kegiatan Belajar Bersama Masyarakat (PKBM) Harapan Bersama yang fokus dalam memberantas buta aksara di Desa Air Glubi. Setelah itu dilakukan penyusunan materi terkait keaksaraan dan dibuat semenarik mungkin agar peserta dapat tertarik untuk belajar.

Sasaran Gerakan Nasional Percepatan Pemberantasan Buta Aksara (GNP-PBA) adalah:

1. Penduduk buta aksara usia 15 tahun ke atas, dengan prioritas penduduk buta aksara usia 15-44 tahun;
2. Penduduk buta aksara parsial atau penduduk yang hanya bisa membaca dan menulis selain huruf latin.

Target GNP-PBA adalah: 1) Sampai dengan Tahun 2009, target nasional penduduk buta aksara adalah sebanyak 7,7 juta orang yang terdiri atas: a) Target pemberantasan penduduk buta aksara yang telah dimelelekasarkan pada Tahun 2005 sebanyak 800 ribu orang; b) Target pemberantasan penduduk buta aksara usia 15 -44 tahun dari Tahun 2006-2009 sebanyak 3,6 juta orang; c) Target pemberantasan penduduk buta aksara usia 45 tahun ke atas sebanyak 3,3 juta orang. 2) Pada tingkat provinsi, target pemberantasan penduduk buta aksara usia 15 tahun ke atas diprioritaskan pada 9 provinsi yang memiliki penduduk buta aksara tertinggi. 3) Pada tingkat kabupaten/kota, target pemberantasan penduduk buta aksara adalah: a) Bagi kabupaten/kota dengan jumlah penduduk buta aksara usia 15 tahun ke atas kurang dari 5%, ditargetkan agar tuntas pada akhir Tahun 2007. b) Bagi kabupaten/kota dengan jumlah penduduk buta aksara usia 15 tahun ke atas antara 5-10%, ditargetkan agar tuntas pada akhir Tahun 2008. c) Bagi

kabupaten/kota dengan jumlah penduduk buta aksara usia 15 tahun ke atas di atas 10%, ditargetkan agar tuntas pada akhir Tahun 2009. Data sasaran dan target GNP-PWB/PBA, terlampir.

### **KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil penelitian maka dapat diambil kesimpulan bahwa Pelaksanaan Program Pemberantasan Buta Aksara Di Kecamatan Bintan Pesisir Kabupaten Bintan (Studi Terhadap Suku Laut Di Desa Air Glubi) sudah berjalan namun banyak yang perlu diperhatikan, berikut hasil penelitian yang dapat diuraikan sebagai berikut :

Sarana prasarana dan pendanaan sudah cukup baik Jumlah dana yang disediakan oleh Direktorat Pembinaan Pendidikan Keaksaraan dan Kesetaraan tahun 2017 untuk Pendidikan Keaksaraan Dasar pada komunitas adat terpencil/khusus sebesar Rp2.500.000.000,- (dua milyar lima ratus juta rupiah) untuk membelajarkan sebanyak 2.500 peserta didik @Rp1.000.000 (satu juta rupiah) kemudian sudah adanya sumber daya manusia dalam program pengentasan buta aksara ini khususnya bagi masyarakat suku laut di Desa Air Glubi. Peran mereka adalah peran seseorang yang menjadikan dirinya sebagai mediator, fasilitator, pendidik, pemungkin, sekaligus sebagai perwakilan bagi masyarakat yang mengupayakan agar masyarakat hidup secara mandiri.

Namun untuk kondisi lingkungan suku laut memang tidak terlalu mendukung adanya program buta aksara ini, mereka yang kebanyakan tinggal di laut sulit diajak berkomunikasi untuk menjelaskan tentang program buta aksara ini, hasilnya hanya beberapa keluarga saja yang mau ikut dalam program tersebut, Desa Glubi lebih identik menjadi kawasan yang terpinggirkan. Hal itu disebabkan

karena rendahnya tingkat pendidikan masyarakat saat ini, sehingga kehidupan masyarakat lebih cenderung didominasi oleh masyarakat miskin yang memiliki latar belakang pendidikan dan status sosial ekonomi yang rendah. Suku laut banyak yang belum menerima program ini, sebagian dari mereka merasa bahwa program ini tidak menguntungkan, kurangnya komunikasi antara pemerintah, PKBM dan masyarakat suku laut menjadi faktor utama kegagalan program ini. Suku laut di Desa Glubi masih banyak yang menutup diri terhadap perubahan salah satunya dalam bidang pendidikan ini. Pendidikan yang diharapkan mampu membawa kemajuan dan kesejahteraan hidup ternyata belum mampu dinikmati, khususnya bagi masyarakat yang berada di daerah terpencil. Tidak hanya itu kemampuan agen pelaksana harus ditingkatkan karena perlu adanya dukungan kemudian pemahaman tentang program ini. Karena program ini banyak membutuhkan pihak pelaksana yang memahami.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Abdulhak, Ishak dan Ugi Suprayogi. 2011. Penelitian Tindakan dalam Pendidikan. Nonformal. Jakarta: Rajawali Pers.
- Ace Suryadi. 2014. Pendidikan Indonesia Menuju 2025, Bandung: PT. Remaja. Rosdakarya
- Agustino, Leo. 2008. Dasar-Dasar Kebijakan Publik. Bandung: Alfabeta
- Direktorat Pendidikan Masyarakat, Dirjen Pendidikan Luar Sekolah, Departemen Pendidikan Nasional. 2006. Pedoman Pelaksana: Gerakan Nasional Percepatan Penuntasan Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun dan Pemberantasan Buta Aksara. Jakarta.
- Dwiyanto, Agus. 2006. Pelaksanaan Good Governance dalam Pelayanan Publik. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Ekowati. 2005. Perencanaan Implementasi & Evaluasi Kebijakan atau Program. Pustaka cakra SOLO. Surakarta.



- Islamy, Irfan. 2009. Prinsip- prinsip Perumusan Kebijakan Negara. Bumi Aksara: Jakarta.
- Keban, T. Yeremias. 2004. Enam Dimensi Strategis Administrasi Publik, Konsep, Teori dan Isu. Gava Media. Yogyakarta.
- Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. 2012 Petunjuk Teknis Pengajuan Dan Pengelolaan Penyelenggaraan Keaksaraan Dasar Dan Keaksaraan Usaha Mandiri Tahun 2012. Jakarta: Kemendikbud
- Kusnadi, dkk. 2003. Keaksaraan Fungsional di Indonesia, Jakarta: Mustika Aksara
- Marzuki, Saleh. H.M. (2010). Pendidikan Nonformal. Dimensi dalam Keaksaraan. Fungsional, Pelatihan, dan Andragogi. Bandung: Penerbit Rosdakarya
- Nugroho. 2003. Kebijakan Publik Formulasi, Implementasi dan Evaluasi. Jakarta: PT. Elex Media Komputindo
- Tilar, H.A.R, Nugroho R. 2001. Kebijakan Pendidikan. Yogyakarta: Penerbit Pustaka
- Subarsono.2015. Analisis Kebijakan Publik. Yogyakarta : Pustaka Pelajar.
- Suharno. 2010. Dasar-Dasar Kebijakan Publik. Yogyakarta: UNY Press.
- Sutopo. 2002. Pengantar Penelitian Kualitatif. Surakarta : Universitas Sebelah Maret
- Triwibowo Budi Santoso. 2012. Pengantar Teori dan Praktik Analisis Kebijakan. Jakarta. Kencana.
- Wahab, Solichin. 2002. Analisis Kebijakan, Dari Formulasi Ke. Implementasi Kebijakan Negara. Jakarta: Bumi Aksara.
- Widodo, Joko. 2011. Analisis Kebijakan Publik : Konsep dan Aplikasi Analisis Proses Kebijakan Publik. Malang : Bayu Media
- Winarno, 2002. Teori dan Proses Kebijakan Publik, Yogyakarta: Media
- Winarno. 2012. Kebijakan Publik Teori, Proses, dan Studi Kasus. Yogyakarta: CAPS.